

STUDI PERBANDINGAN PERUSAHAAN PERSEORANAN (SOLE PROPRIETORSHIP) ANTARA NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

Oleh:

Ihza Qurnia Akbar,
M. Tanzil Multazam
Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

Pendahuluan

Berdasarkan data The World Bank Grup pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat ke-73 secara global dalam indeks Ease of Doing Business (EoDB) dan diharapkan mampu menembus peringkat ke-40 setelah disahkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana bentuk hukum yang mengatur Sole Proprietorship di negara Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana bentuk Sole Proprietorship yang ada di negara Indonesia dan Belanda?
3. Bagaimana perbandingan Sole Proprietorship di negara Indonesia dan Belanda?

Metode

- Jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research)
- Metode studi perbandingan (study comparative)

Hasil

Ease of Doing Business

The World Bank: Ease of Doing Businesses 2020

E

O

D

B

STARTTING BUSINESS

Kemudahan dalam memulai dan menjalankan bisnis

REGISTERING PROPERTY

Pendaftaran asset-asset property

DEALING WITH CONSTRUCTION PERMIT

You can edit this text for your presentation

ENFORCING CONTRACTS

Pelaksanaan kontrak-kontrak yang telah disepakati

Pembahasan

PERAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Peran para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada perekonomian nasional menyumbang 61.07% PDB dan menyerap 96.9% total tenaga kerja.

KENDALA UMK

UMK mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan perbankan karena banyak yang belum memiliki bentuk badan usaha formal.

Pembahasan

PT PASCA UU CIPTAKER

Akibat dari disahkannya UU No. 11 tahun 2020 melahirkan dua bentuk badan hukum Perseroan Terbatas*:

PT. PERSEKUTUAN MODAL	PT. PERSEORANGAN
<ul style="list-style-type: none">• Didirikan oleh dua orang atau lebih	<ul style="list-style-type: none">• Didirikan oleh orang perorangan
<ul style="list-style-type: none">• Pendirian berdasarkan pada perjanjian	<ul style="list-style-type: none">• Pendirian dengan pendaftaran
<ul style="list-style-type: none">• Asosiasi modal	<ul style="list-style-type: none">• Khusus Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
<ul style="list-style-type: none">• Tanggung jawab terbatas (limited liability)	<ul style="list-style-type: none">• Tanggung jawab terbatas (limited liability)

Pembahasan

MODAL PENDIRIAN PT KRITERIA UMK

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 07 tahun 2021 kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koeprasi dan Usaha UMKM:

- a. Usaha Mikro yang jumlah tertinggi modal usahanya yang tidak termasuk tanah dan bangunan sebesar Rp1.000.000.000;
- b. Usaha Kecil yang jumlah minimal modalnya sebesar Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000;

Dengan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0.5% berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Temuan Penting Penelitian

Pengenalan

SOLE PROPRIETORSHIP DI BELANDA

Sole Proprietorshi/Eenmanszaak (one-man business). Disebutkan secara tidak langsung di Handelsregisterwet 2007 (UU Pendaftaran Bisnis) “een onderneming die in Nederland gevestigd is en die toebehoort aan een natuurlijke persoon” yang bersifat bukan entitas yg terpisah dari pemiliknya.

fppt.com

Temuan Penting Penelitian

Perpajakan Eenmanszaak

Perpajakan Eenmanszaak: Eenmanszaak dikenakan Inkomstenbelasting (PPH) masuk kategori 1 sebagai pajak penghasilan dari pekerjaan & kepemilikan rumah di wet-inkomstenbelasting pasal 5 huruf (b) :

Perhitungan besaran persentase kena pajak penghasilan dari seluruh total pendapatan bersih yang didapat bagi *Eenmanszaak*

Pendapatan yang kena pajak jika lebih dari	Jika tidak lebih dari		Persentase pajak
-	€ 19.645	-	5,85%
€ 19.645	€ 33.363	€ 1.149	10,85%
€ 33.363	€ 55.991	€ 2.637	42%
€ 55.991	-	€ 12.140	52%

Temuan Penting Penelitian

	Indonesia	Belanda
Gambaran Umum	Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dapat didirikan serta dijalankan oleh satu dengan kualifikasi UMK.	Perusahaan perseorangan yang didirikan serta dijalankan oleh satu orang yang bukan merupakan badan hukum.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Lapangan Kerja; • Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT); • PP No. 08/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Serta Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK; 	<ul style="list-style-type: none"> • Burgerlijk Wetboek Boek 2: Recth Persoon; • Handelsregisterwet 2007 • Wet-Inkomstenbelasting 2001;
Keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • Berbadan Hukum dengan prinsip tanggung jawab terbatas; • Tanpa memerlukan ratifikasi pihak lainnya; • Pajak yang rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran yang mudah dan berbiaya rendah; • Tanpa perlu memiliki modal dasar; • Pajak yang rendah dan fleksibel;
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki jangka waktu; • Modal yang terbatas; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab yang tidak terbatas; • Modal terbatas serta tidak mampu mengakses pendanaan perbankan;

Manfaat Penelitian

1. Dapat memahami perbedaan sole proprietorship di Indonesia dan belanda
2. Dapat menjadi rujukan pemerintah untuk membuat kebijakan yang baik bagi pelaku usaha khususnya UMK

Referensi

1. The World Bank Group. Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington: the World Bank Group. 2020.
2. Felicia Maria & Ulya Yasmine Prisdani. Establishing A Limited Liability Company (A Comparative Analysis On Singapore and Indonesian Law). The Lawpreneurship Journal Vol. 01 Issue 01. 2021.
3. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Kencana. 2010
4. Anindita Trinura Novitasari. Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. Jakarta: Journal of Applied Business and Economic Vol. 09. 2022.
5. Siaran Pers Kementerian Koordinator Perekonomian RI No. HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 tentang Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah.
6. Desak Putu Dewi Kasih, dkk. Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Perorangan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. Jurnal Arena Hukum. 2022.

Referensi

1. Wuri Sumampouw, Kana Kurnia & Imam Ridho Arrobi. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Balikpapan: Jurnal de Jure Vol. 13. 2021.
2. Putu Devi Yustisia Utami & Kadek Agus Sudiarawan. Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil (Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan). Udayana: Udayana Master Law Journal. 2021.
3. Sri Siti Munalar. dkk. Peran Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas: Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tangerang Selatan: Bhakti Hukum. 2022.
4. Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

